

## **Pemberdayaan Berbasis Kemitraan Antara Pemerintah dengan Kelompok Tani Tri Tunggal Wonorejo**

---

Derry Ahmad Rizal

*Sub Bidang Program dan Informasi Dinas Sosial*

*Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*

*Email: bloer@rocketmail.com*

---

### Abstract

This paper examines how the partnership was established between the Sleman Government and the peasant group of Tri Tunggal in Wonorejo—a policy appropriate partnership. It is known that the perceived policy sometimes turns things around with what is in the field or the right target regulations according to the needs of the community. This article is based on two theories, top-down policies and social capital as a form of organizing peasant groups. In answering the question, in fact, this article is an extension of the design of a qualitative research model that describes, analyzes, and interprets field data in a narrative way. For that, the method of interviewing, observation, and documentation is chosen to complete the data until it can be interpreted into the new meaning of science. Thus, this research has produced some interesting findings, such as government partnership to peasant group of Tri Tunggal with the approach of counseling, mentoring, and marketing of the agricultural product. As a matter of fact, the regulation is a reference for the government in empowering peasant groups.

Keywords: empowerment; peasant; partnership.

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana kemitraan yang dibangun antara Pemerintah Sleman dengan Kelompok Tani Tri Tunggal Wonorejo—kemitraan yang sesuai dengan kebijakan. Diketahui bahwa kebijakan yang dipersepsikan terkadang berbalik keadaan dengan apa yang ada di lapangan atau regulasi yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Artikel ini didasari atas dua teori, kebijakan yang bersifat top down dan modal sosial sebagai bentuk pengorganisasian kelompok tani. Dalam menjawab persoalan tersebut, sebetulnya, artikel ini merupakan pengembangan dari desain model penelitian kualitatif yang menggambarkan, menganalisa, dan



menginterpretasikan data lapangan secara naratif. Untuk itu, metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih untuk melengkapi data hingga dapat ditafsirkan ke dalam makna baru keilmuan. Dengan begitu, riset ini melahirkan beberapa temuan menarik, antara lain kemitraan yang dilakukan pemerintah kepada kelompok tani Tri Tunggal dengan pendekatan penyuluhan, pendampingan, dan pemasaran hasil produksi pertanian. Sebagai dasarnya, regulasi Perda menjadi acuan bagi pemerintah dalam memberdayakan kelompok tani.

Kata Kunci: pemberdayaan; petani; kemitraan.

## Pendahuluan

Sejak dulu, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Di mana bertani merupakan mata pencaharian utama sebagian besar rakyat bangsa ini. Anugerah kekayaan alam yang melimpah, tanah yang subur, musim yang teratur, membuat Indonesia menjadi negeri yang cocok untuk menanam berbagai bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Sebagian besar masyarakat menanam padi, karena beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Selain padi, jagung juga salah satu andalan karena menjadi komoditas yang menguntungkan. Hal ini berdampak pada kualitas hasil pertanian yang diakui dunia. Di era Orde Baru, tepatnya tahun 1984, Indonesia menjalankan kebijakan revolusi hijau yang berhasil melakukan swasembada beras, sehingga mampu ekspor ke negara lain. Tentu saja, kondisi ini berimplikasi pada peningkatan produktifitas ekonomi riil yang disumbang langsung dari aktivitas bidang pertanian. Namun *euforia* yang sempat menghinggapi bangsa ini, faktor perkembangan zaman dan modernisasi, sektor pertanian lambat laun mengalami perubahan. Dari sistem bertani tradisional menjadi sistem bertani yang modern. Teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian pun semakin bertambah. Semua itu tentu sangat berdampak positif bagi para petani.

Berdasarkan hasil sensus pertanian 2013 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 26,14 juta atau mengalami penurunan sebanyak 5,10 juta rumah tangga dari 31,23 juta dari tahun sebelumnya. Sub sektor tanaman pangan memiliki 17,73 juta

rumah tangga, sub sektor peternakan 12,97 juta rumah tangga, 12,77 juta rumah tangga untuk sub sektor perkebunan. Sementara untuk sub sektor perikanan dengan kegiatan penangkapan ikan memiliki jumlah rumah tangga usaha yang paling sedikit, yaitu sebanyak 0,86 juta rumah tangga.<sup>1</sup>

Melihat data catatan di atas, penurunan terjadi hampir di seluruh Indonesia, tidak terkecuali beberapa kawasan di Yogyakarta. Untuk mengantisipasi penurunan tersebut, masyarakat perlu membuat sebuah komunitas baru dalam mengelola dan mengembangkan kelompok berbasis pertanian. Basis ini dikhususkan untuk mempertahankan komunitas masyarakat petani yang masih bergelut dengan pekerjaan pokok mereka. Misalkan, di kecamatan Ngaglik Sleman, ada banyak terdapat kelompok tani, salah satunya kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo. Awal mula berdirinya kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo bernamakan Kelompok Tani Ternak Sapi Potong Ngudi Makmur Wonorejo, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman. Kelompok ternak yang berdiri pada tanggal 10 Mei 2005 ini menempati lahan tanah kas Desa Sariharjo seluas 3000 m<sup>2</sup>. Pendirian kelompok ternak ini atas inisiatif beberapa orang yang ingin meningkatkan kebersihan pedukuhan dan derajat kesehatan masyarakat serta mengelola ternak secara intensif berpola agribisnis. Kelompok ternak Ngudi Makmur merupakan kelompok ternak berpredikat kelas madya dengan anggota sebanyak 47 orang.<sup>2</sup> Jumlah anggota kelompok ini hingga kini yang terdaftar di Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman, sebanyak 71 anggota. Kelompok ini memiliki populasi hewan ternak mencapai 88 ekor yang terdiri dari indukan, jantan dan anakan atau *pedet*. Kegiatan usaha pokok yang dilakukan kelompok ternak Ngudi Makmur berupa pembibitan sapi potong, pembuatan pupuk organik padat dan usaha pupuk cair.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tim BPS, "Hasil Sensus Pertanian", [Internet], <http://rri.co.id/index.php/berita/80482/BPS-Umumkan-Hasil-Sensus-Pertanian-2013>, diakses 25/02/2014.

<sup>2</sup> Kelas madya sendiri ada penilaiannya dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP). Kelas madya mempunyai nilai antara 501-750 penilaian berdasarkan keuangan, pengorganisasian kepengurusan, sarana prasarana dan penghasilan

<sup>3</sup> Tugimin, Wawancara, 10 April 2014.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan ternak, kelompok ternak Ngudi Makmur mengembangkan lahan garapan yang ditanami hijauan pakan. Selain hijauan, juga diberikan pakan konsentrat. Saat terjadi kekurangan pakan, anggota kelompok Ngudi Makmur terbiasa membuat pakan alternatif seperti *biofermentasi* jerami. Siring berkembangnya berbagai usaha yang dilakukan, maka pada 25 Juni 2010, kelompok Ngudi Makmur diresmikan sebagai Kelompok Tani Tri Tunggal dan mengukuhkan unit usaha pembuatan pupuk menjadi Rumah Kompos Tani Subur. Saat ini produksi kompos mencapai 1,5 ton per hari dan pemasarannya tidak hanya wilayah Sleman, juga ke daerah lain di luar DIY. Hal ini dilakukan dengan pola kemitraan antar gapoktan, asosiasi tebu, pedagang pengecer, instansi pemerintah, swasta dan perorangan.

Melalui produksi pupuk kompos, maka kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo memanfaatkan sebagian lahan yang ada untuk menanam sayuran organik. Pemanfaatan lahan dan pengolahan sayuran organik ini tidak lain karena kelompok tani ini berkeinginan memproduksi sayuran yang sehat dan bebas dari zat kimia yang selama ini ada dipasaran. Secara perlahan tapi pasti melakukan penjualan hasil produksi sayuran organik ke pasar-pasar terdekat, walaupun harganya sedikit mahal dari harga sayuran biasa.

Semua kegiatan kelompok tani Tri Tunggal tidaklah lepas dari campur tangan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman. Walaupun hingga kini berjalannya kelompok tani secara mandiri, tetapi tak lepas dari pengawasan stakeholder terkait. Dengan adanya kerjasama, penerapan kebijakan, dan program pemerintah yang sudah ada sangat membantu berjalannya kelompok tani Tri Tunggal. Padahal dari banyaknya program pemerintahan terkadang gagal atau mencari untung semata. Tetapi berbeda dengan yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Sleman nampak begitu serius dalam melakukan pendampingan, pemberdayaan dan penyuluhan terhadap program pertanian.

Keberhasilan yang dilakukan pemerintah ini ditopang oleh beberapa studi sebelumnya yang membahas hal sama. Misalkan, karya Haridi yang berjudul "*Dinamika Kelompok*", menjustifikasi bahwa dinamika kelompok

tani mempunyai definisi yang dapat menggerakkan kekuatan dan potensi yang ada di masyarakat. Selain itu, gerak kelompok ini saling mempengaruhi dalam proses mencapai tujuan bersama.<sup>4</sup> Dalam kajian lain, misalnya karya Sukiman yang berhasil mengungkap bahwa keberhasilan kelompok tani di Kulonprogo adalah modal awal pengembangan relasi kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat.<sup>5</sup>

Setelah meninjau beberapa karya tersebut, sebetulnya kekuatan atau pola pendekatan yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Sleman dengan Kelompok Tani Tri Tunggal dalam melakukan pemberdayaan dipengaruhi beberapa faktor. Dimana dalam pendeskripsian, faktor-faktor kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo memilih melakukan pertanian organik dan cara pengorganisasian mulai dari re-struktur keanggotaan hingga hasil panen atau pemasarannya. Sejalan dengan itu, kajian ini mengungkap tentang kekuatan pola pemberdayaan dan capaian dari hasil kemitraan antara pemerintah dengan kelompok tani.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengungkap pola kemitraan sebagai basis pemberdayaan petani dan capaian ideal dari hasil kemitraan antara pemerintah dengan kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo. Hasil kemitraan yang dibangun antara pemerintah dan kelompok tani, salah satunya dengan pengembangan pertanian organik. Sementara itu, kajian dalam artikel ini merupakan pengembangan riset kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam kebanyakan penelitian berbasis studi kasus para pengkajinya bersifat *field of life*, di mana cacatan hasilnya dinarasikan secara deskriptif.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sunarru Samsi Hariadi, *Dinamika Kelompok: Teori dan Aplikasi Keberhasilan Kelompok Tani sebagai Unit Belajar, Kerjasama, Produksi, dan Bisnis*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2011), hal. 3.

<sup>5</sup> Sukiman, "Pemberdayaan Kelompok Tani Ngudi Makmur oleh LSM Yayasan Pengembangan Ekonomi Rakyat Indonesia (LSM YAPERINDO) di Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo", (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2006). <http://digilib.uin-suka.ac.id/15640/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

<sup>6</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 25.

Tahap selanjutnya, sumber data diambil menggunakan metode *purposive*. Digunakannya metode ini agar dalam proses pengambilan data lapangan lebih kaya informasi yang di dapat sehingga penggalan data bisa mendalam.<sup>7</sup> Dalam metode ini juga penulis tidak membatasi narasumber tapi model pengambilan datanya bersifat *snowball*—dibiarkan menggelinding seperti bola salju. Penulis bertanya kepada salah dua narasumber hingga mencapai puncak titik jenuh dari sumber informasi yang digali, selanjutnya mereka merekomendasikan kepada narasumber lain yang dianggap kredibel dan terpercaya. Salah dua narasumber yang penulis datangi adalah Tugimin (ketua kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo) dan Restu (PNS Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Sleman). Untuk mendukung informasi, maka penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya penulis melakukan proses pengecekan kabsahan data. Hal ini diperlukan guna mendukung data yang terkumpul; apakah kredibel atau tidak, sehingga pada saat diolah dan dianalisis betul-betul bisa dipercaya. Dalam proses pengecekan data, penulis menggunakan metode triangulasi. Tahap terakhir, barulah data bisa dianalisis menggunakan metode reduksi; penarikan kesimpulan yang bersifat deduktif.

## **Kemitraan Sebagai Modal Sosial**

Penjelasan tentang masyarakat yang aktif dalam perubahan sosial dapat kita lihat dalam proses pemberdayaan. Proses ini menggambarkan bagaimana sistem masyarakat yang aktif itu bisa melihat target perubahan sosial, kondisi yang ingin dicapai, dan pola aktor yang berperan di dalamnya sangat intens mendampingi proses pemberdayaan. Selain itu, faktor lain yang dapat menentukan perubahan sosial yang cepat dalam kelompok masyarakat adalah modal sosial. Di mana modal sosial adalah salah satu kontens kajian yang bersinergi dengan praktik pemberdayaan. Praktik yang dilakukan dalam proses pemberdayaan tidak terlepas dengan pembahasan soal pengembangan

---

<sup>7</sup> Winarno Suharman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hal.139

masyarakat yang terpadu dan serentak sesuai kegiatan program yang sudah direncanakan.

Dengan begitu, tujuan pemberdayaan harus dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di semua aspek. Namun ada aspek-aspek tertentu yang dipandang harus lebih dulu dikuatkan, agar masyarakat dapat mengembangkan aspek-aspek lainnya. Dari kajian yang sudah penulis telaah menyoal kelemahan modal fisik sebagai pintu masuk program pemberdayaan dan dampak-dampak negatif bantuan modal ekonomi, maka kedua jenis modal tersebut kurang tepat untuk digunakan sebagai sarana mendasar dalam pemberdayaan. Selain kedua jenis modal tersebut, masih ada modal alam, modal manusia dan modal sosial. Modal manusia dan modal sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan walaupun keluaran yang dihasilkan berbeda. Modal manusia dapat dilihat dari keluaran berbentuk pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bertindak. Modal sosial merupakan modal yang sangat konkrit.

Konsep modal sosial (*social capital*) pertama kali dikemukakan oleh James Coleman, menurutnya modal sosial bukan entitas tunggal tetapi bermacam-macam entitas yang berbeda. Secara umum, modal sosial tersebut memiliki dua karakteristik, yaitu aspek struktur sosial dan tindakan individu yang ada dalam struktur tersebut. Seperti bentuk modal sosial lainnya, memungkinkan pencapaian beberapa tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa keberadaannya.<sup>8</sup> Dalam konteks pemberdayaan, penjelasan mengenai modal sosial sangat relevan untuk menjawab pertanyaan, siapa yang akan melakukan pemberdayaan, apa yang dilakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Ife dan Tesoriero mengatakan bahwa:

“Semua pengembangan masyarakat seharusnya bertujuan membangun masyarakat. Pengembangan masyarakat melibatkan pengembangan modal sosial, memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menyatukan mereka dan membantu mereka untuk saling berkomunikasi dengan cara yang dapat mengarah pada dialog yang sejati, pemahaman dan aksi sosial”.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> James Colleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, (Jakarta: Nusa Media, 2010), hal. 418.

<sup>9</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 363.

Dari penjelasan tersebut, modal sosial merupakan bentuk dari konsep ideal yang dapat digunakan sebagai kekuatan penggerak dalam pemberdayaan. Modal sosial memberi dukungan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan secara bersama-sama dan timbal balik yang diperoleh. Selain sebagai sarana yang dapat menggerakkan pemberdayaan, modal sosial juga sekaligus proses dari tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan itu sendiri. Menurut Ife dan Tesoriero, menyatakan:

“Bagian dari membangun modal sosial adalah memperkuat ‘masyarakat madani’. Masyarakat madani adalah istilah yang digunakan untuk struktur-struktur formal atau semi-formal yang dibentuk masyarakat secara sukarela dengan inisiatif mereka sendiri, bukan sebagai konsekuensi dari program atau arahan tertentu dari pemerintah”.<sup>10</sup>

Untuk memahami lebih jauh kekuatan yang ada, dengan menelaah pada pengertian, dimensi dan unsur-unsurnya dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai pentingnya modal sosial dalam pemberdayaan. Modal sosial memiliki peran yang sangat penting pada beberapa kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas. Sama seperti halnya modal fisik dan modal finansial, modal sosial juga bisa menimbulkan dampak positif. Rasa saling percaya dibentuk dalam waktu yang tidak sebentar serta memerlukan proses-proses sosial yang berliku. Menurut Coleman, modal sosial didefinisikan sebagai:

“Kumpulan sumber yang melekat dalam relasi keluarga dan komunitas organisasi sosial yang bermanfaat untuk perkembangan kognisi sosial anak muda. Sumber ini berbeda bagi orang yang dapat memberikan keuntungan penting untuk perkembangan modal manusia—baik anak-anak maupun dewasa”.<sup>11</sup>

Dari beberapa pengertian tentang modal sosial di atas, pada kesempatan ini penulis dapat mengelompokkannya menjadi tiga, yaitu antara lain; pertama, modal sosial diartikan sebagai hubungan vertikal dan horisontal dalam suatu kelompok atau komunitas yang dibangun atas kepercayaan untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai aspek. Kedua, modal sosial dapat diartikan

---

<sup>10</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, hal. 35.

<sup>11</sup> James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, hal. 415.



sebagai hubungan horizontal yang dibangun berdasarkan kepercayaan, jaringan dan perangkat nilai-nilai yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang utamanya di bidang ekonomi dan produksi. Ketiga, hubungan horizontal yang dapat menumbuhkan kepercayaan, jaringan dan norma-norma.

Berdasarkan ketiga aspek di atas, maka artikel ini senantiasa melakukan identifikasi terhadap masalah sosial dan tujuan intervensi dalam konteks pemberdayaan. Tentu, merujuk pada konsep modal sosial yang dipandang sebagai model pengembangan komunitas. Pengembangan ini identik dengan proses pemberdayaan yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam komunitas di lokasi lapangan pada saat proses pengumpulan data. Selain itu, pemberdayaan harus dilakukan oleh anggota komunitas dari semua lapisan secara bersama-sama. Sebab, masalah yang dihadapi masyarakat erat kaitannya dengan budaya miskin dan lemahnya modal sosial dari sebuah komunitas. Kondisi ini dapat berdampak pada nilai dan norma dalam komunitas sehingga pengaruhnya langsung cukup kuat terhadap pembentukan sikap dan perilaku warga.

Jika kita merujuk lebih jauh, sesungguhnya modal sosial itu dimensinya cukup luas. Dimensi yang bisa dikembangkan, guna mendukung analisa teoritis dalam kajian ini, adalah bagaimana modal sosial menjadi sumber nilai utama dalam aspek pengutan kapasitas untuk selanjutnya dijadikan sebagai potensi pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini erat kaitannya dengan rencana program pemerintah yang nantinya dapat termanifestasikan dalam kebijakan, sehingga pendekatan dari penerapan regulasi yang disusun bersifat *top down*.

Dengan pendekatan *top down*, implementasi kebijakan sifatnya sentralistik dan di mulai dari *policies maker* dan keputusan yang diambil cenderung mengabaikan partisipasi masyarakat. Selain itu, model ini bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan politik kebijakan yang telah ditetapkan oleh *policy maker* harus dilaksanakan oleh administratur atau birokrat pada level bawah. Sebagaimana dirumuskan oleh *Donald Van Metter* dan *Carl Van Horn*

dalam sebuah karya *A Model of The Policy Implementation*.

Dalam proses implementasi kebijakan, seorang pemain kebijakan dituntut untuk memberikan kinerja maksimal sesuai dengan *performance* instrumen pekerjaan di sebuah instansi.<sup>12</sup> Dari proses yang bersifat *top down* sesuai dengan instrumen pekerjaan, secara tidak langsung kasus yang ada di Kabupaten Sleman, yakni kemitraan antara pemerintah dengan kelompok tani sering tidak menuai kecocokan. Terkadang pendekatan yang bersifat *top down* mengalami kegagalan karena adanya pertentangan dari masyarakat. Kondisi ini berjalan cukup lama, masyarakat tidak terlibat partisipasi penuh dalam setiap program yang dijalankan.

## Regulasi Sebagai Acuan Bermitra

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Pemerintah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai berbagai tugas, antara lain: (1) Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan dan kehutanan. (2) Pelaksanaan tugas bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan dan kehutanan. (3) Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan dan kehutanan. (4) Pembinaan dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan dan kehutanan. (5) Penyelenggaraan penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan dan kehutanan. (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas-tugasnya. Berdasarkan aturan Perda tersebut, tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memiliki terkonsentrasi terhadap hal tanaman pangan dan hortikultura—seperti padi, cabai, jagung dan sayuran lainnya.

---

<sup>12</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2006).

Pemerintahan Sleman sangat serius dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terlihat dari kedekatan dengan para kelompok tani bahkan seperti tak ada jarak antara pemerintah dengan masyarakat. Seperti halnya pertemuan rutin, pemerintah Sleman pun ikut andil di dalamnya. Tujuan dari ikut andil ini agar tidak adanya jarak antara pemerintahan dengan masyarakatnya atau kelompok tani dan mengetahui keluh kesah atas persoalan yang sedang dihadapi. Tidak hanya mengenai keluh kesah para kelompok tani, tetapi pertemuan rutin ini juga bertujuan mengetahui perkembangan kelompok tani.

Kekuatan dalam pola kemitraan antara Pemerintah Sleman dengan kelompok tani khususnya kelompok tani Tri Tunggal, ialah menerapkan pendekatan *top down* dengan maksimal. Memberikan ruang proses terhadap para petani dalam mengembangkan kelompok maupun pertaniannya. Pemberian ruang pun tidak serta merta lepas tangan, akan tetapi masih dalam pengawasan. Pihak yang mengawasi perkembangan kelompok tani langsung dari pengelola pertanian yang paham mengenai pertanian.

Kekuatan yang kedua dalam pola kemitraan Pemerintahan Daerah Sleman ialah melakukan tugasnya secara penuh. Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi acuan dalam melakukan pembinaan pertanian. Seperti yang diungkapkan oleh petugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman berikut.

“... ya, kita menjalankan tugas sesuai peraturan yang ada dan tugas-tugas yang sudah disepakati. Di luar itu, kita juga terus mengawasi hal-hal yang terkait pertanian di Sleman.”<sup>13</sup>

Kekuatan terakhir ialah tidak adanya jarak antara pemerintahan Sleman dengan para petani. Selama ini yang terjadi di berbagai pemerintahan cenderung eksklusif dan terlampau berjarak, tidak mau terjun langsung ke masyarakat. Semua itu mengakibatkan pendekatan *top down* selalu gagal. Tetapi berbeda dengan yang dilakukan pemerintahan Sleman khususnya

---

<sup>13</sup> Restu, Wawancara, 3 Juni 2014.

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; pendekatan *top down* yang bisa dibilang berhasil. Bahkan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pun ikut terjun melihat situasi perkembangan kelompok petani yang ada di Sleman.

## Realisasi Pola Kemitraan

Pendekatan dengan cara pertemuan umum dan penyuluhan dalam kemitraan yang dibangun oleh pemerintah bisa dikatakan efektif. Di samping penyampaian program pemerintah mengenai kelompok tani, para anggota kelompok tani bisa menyampaikan aspirasi. Fungsinya adalah mengembangkan sikap, menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman, mencapai persetujuan dan pembuatan rencana kegiatan. Sedangkan penyuluhan berfungsi memberikan ilmu terapan kepada para petani dan selebihnya petani yang mempraktekan.

Setelah langkah penyuluhan dilakukan, pemerintah melakukan evaluasi bergilir dari kelompok tani yang satu ke kelompok tani yang lainnya. Proses ini diadakan 3 bulan sekali se-Kabupaten Sleman yang diberi nama "*Forum Komunikasi Kelompok Tani*". Evaluasi atau forum pertemuan 3 bulanan yang dilakukan pemerintahan dengan para petani yang ada di Sleman bertujuan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi. Evaluasi 3 bulanan dilakukan secara bergilir dari kelompok tani yang satu ke kelompok tani lainnya mempunyai fungsi untuk *sharing* gagasan yang dilakukan kelompok tani selaku tuan rumah kepada kelompok tani lainnya. Fungsi lainnya ialah mengeratkan tali silaturahmi antar kelompok tani se-Kabupaten Sleman.

Forum komunikasi ini berbentuk semi formal, seperti halnya resepsi pernikahan. Runtutan acaranya pun diisi mulai dari sambutan-sambutan yakni; sambutan dari Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dilanjut sambutan Kepala Kecamatan yang menjadi tuan rumah dan yang terakhir sambutan dari ketua kelompok tani selaku menjadi tuan rumah. Setelah itu, diisi serangkaian materi yang disampaikan oleh penyuluh

pertanian dan memaparkan kondisi pertanian yang terjadi. Selanjutnya, proses tanya jawab tentang pertanian hingga diakhiri dengan hiburan. Pada saat kelompok tani Tri Tunggal menjadi tuan rumah, hiburan pun dilakukan dengan menggelar *dangdutan* dan mengadakan hadiah undian berupa pupuk organik hasil produksi sendiri sebanyak 1 ton yang dibagikan kepada 4 kelompok tani yang beruntung.

Selanjutnya, adanya forum komunikasi kelompok tani ini, pemerintah bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh petani dan bisa menyampaikan aspirasi sesuai dengan kebutuhan kelompok masing-masing. Sehingga pemerintah pun bisa memfasilitasi kebutuhan kelompok tani. Seperti halnya yang diungkapkan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pada forum komunikasi tani se-Kabupaten Sleman berikut.

“Jika membutuhkan *polibag* atau pelatihan penggunaan traktor kami dari pihak Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan siap membantu. Tidak hanya itu, jika butuh data-data terkait kelompok tani lainnya dari pihak Pemda siap memberikan.”<sup>14</sup>

Pemerintahan Sleman begitu serius dalam mengemban tugasnya, khususnya Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, karena kedekatan yang dilakukan pemerintahan daerah Sleman. Sehingga tidak ada rasa canggung dalam menyampaikan persoalan yang dialami oleh petani. Tentu saja, hal ini dapat berdampak pada program pertanian yang berkelanjutan. Sementara setelah memberikan penyuluhan, pemerintah tidak lepas tangan begitu saja, tetapi masih melakukan pendampingan secara intens dan langsung terjun ke lapangan. Dan, yang bertugas secara langsung kepada petani adalah PPL pemerintah. Dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok tani sangatlah penting guna mengembangkan kelompok tani itu sendiri. Ada beberapa sasaran dari pemerintah Sleman terkait pembinaan, yakni peningkatan pengetahuan dan kemampuan petani dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam menggarap usaha tani.

---

<sup>14</sup> Widi Sutikno, Wawancara, 9 April 2014.

## Modal Sosial Sebagai Pola Kemitraan

Dalam membangun kesadaran untuk selalu bergerak, para petani melalui kelompok yang sudah dibentuk berupaya melakukan tindakan-tindakan nyata. Sebagai salah satu tindakan yang dilakukan itu, adalah membangun kepercayaan diantara para anggota kelompok dan pemerintah sebagai stakeholder terkait. Dengan begitu, dalam kajian ini, setidaknya, modal sosial dalam membangun kepercayaan telah dibentuk. Modal sosial yang dikembangkan adalah sistem kepercayaan, norma, dan jaringan.

### *Modal Sosial Kepercayaan*

Manusia secara alamiah melakukan interaksi dengan lingkungan, baik dengan sesamanya atau dengan makhluk hidup lainnya. Kepercayaan merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang saling menguntungkan melalui interaksi dan komunikasi yang baik. Kepercayaan memberikan dampak positif bagi kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo terhadap konsumen, tenaga kerja dan relasi kerja lainnya. Kepercayaan merupakan unsur dasar dari modal sosial. Di mana kepercayaan dibangun mulai dari awal produksi hingga sampai proses pemasaran.

“Di sini sesama anggota kelompok tani saling percaya dengan apa yang dilakukan. Bahkan dengan kelompok ternak, karena jika tidak saling percaya sulit terealisasi program dari pemerintah. Maka kita saling membutuhkan satu sama lainnya.”<sup>15</sup>

Kepercayaan yang diterapkan oleh kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo, terdapat di dalam produksi hasil. Dalam produksi tanaman organik, ketua kelompok tani membiarkan anggota melakukan produksi tanamannya masing-masing di lahan pribadinya. Tetapi tidak langsung dilepas, ada arahan dan pengawasan dari unit kelompok tani dengan tujuan dalam pemakaian pupuk organik agar tidak sembarangan. Kepercayaan merupakan komponen utama modal sosial, karena hal ini dapat memainkan peran yang penting dalam memperoleh akses manfaat dari jaringan sosial. Komunikasi juga

---

<sup>15</sup> Tugimin, Wawancara, 10 April 2014.

berperan penting dalam membangun kepercayaan karena dengan komunikasi yang baik akan memberi nilai tambah pada seseorang.

Kepercayaan bisa tumbuh ketika terjadi interaksi secara langsung, misal kepada konsumen dan relasi kerja. Hal ini dilakukan kepada konsumen dan menjadi sangat penting, karena sasaran dari kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo adalah konsumen yang membeli hasil produksi tanaman organik. Bagaimana peran kelompok dapat menjaga konsumen tetap menjaga hubungan baik supaya tidak beralih ke tempat yang lain jika ingin membeli hasil produksi tanaman organik. Kepercayaan bisa dijaga dengan hasil produksi yang terbaik dan pengemasan hasil produksi yang menarik.

### *Modal Sosial Norma*

Pada umumnya kehidupan sosial tidak dapat berlangsung, jika tidak ada norma-norma yang mengatur tingkah laku masyarakat. Norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan, dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti halnya kode etik profesional. Norma dibangun dan dikembangkan berdasarkan sejarah kerjasama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama.<sup>16</sup> Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain tidak hanya sebagai teman dalam kesendirian, namun membutuhkan *partner* dalam melakukan sesuatu. Entah itu aktifitas sosial, ekonomi, sosial, budaya, politik maupun amal perbuatan yang terkait dengan ibadah terhadap Tuhan. Untuk itu, masyarakat mempunyai aturan-aturan yang harus dijalankan oleh semua warga yang tinggal dalam masyarakat itu.

Norma kelompok berpengaruh nyata terhadap keberhasilan kelompok sebagai unit kerjasama. Semakin kuat norma kelompok, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan kelompok sebagai unit kerjasama.<sup>17</sup> Hal ini disebabkan

<sup>16</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 99.

<sup>17</sup> Sunarru Samsi Hariadi, *Dinamika Kelompok: Teori dan Aplikasi Keberhasilan Kelompok Tani sebagai Unit Belajar, Kerjasama, Produksi, dan Bisnis*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2011), hal. 193.

oleh semakin kuatnya norma kelompok, berarti norma tersebut secara meluas dipahami dan ditaati oleh anggota kelompok, mendorong dan mengikat anggota kelompok lebih aktif dan disiplin. Adanya norma-norma di dalam kelompok, menunjukkan adanya berbagai harapan yang membatasi tingkah laku seseorang dalam kelompok.

Norma dalam kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo, apabila terdapat masalah di internal organisasi petani sudah ada kesepakatan pertemuan rutin tiap bulannya. Agenda bulanan ini, umumnya, membahas tentang permasalahan yang terjadi selama sebulan, iuran rutin untuk kas dan apabila terdapat masalah yang serius, maka kembali kepada AD/ART yang sudah disepakati. Maka dari itu, dalam kelompok tani yang berinteraksi dengan hubungan yang cukup akrab, ketika interaksi kelompok menguat maka terjadi proses komunikasi yang baik (secara kuantitas maupun kualitas). Dengan semakin banyak menemukan ide dan relasi kerjasama, akibatnya tingkat keberhasilan kelompok tani sebagai unit kerjasama terus meningkat.<sup>18</sup>

### *Modal Sosial Jaringan*

Infrastruktur yang dinamis dari modal sosial dapat berupa wujud jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi yang memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama.<sup>19</sup> Jaringan telah lama dipandang penting bagi keberhasilan interaksi bisnis. Khususnya pada tahap awal, banyak diyakini bahwa jaringan berfungsi sebagai sumber informasi penting. Selain juga dapat menjadi sesuatu yang kritis dalam mengidentifikasi dan menggali peluang bisnis. Menurut Field, jaringan pun dapat memberikan akses keuangan.<sup>20</sup>

Jaringan sosial merupakan aset yang sangat bernilai, karena dapat mendorong orang bekerja satu sama lain dan tidak hanya sekedar kenal secara langsung. Jaringan sosial yang baik juga akan menghasilkan kerjasama

---

<sup>18</sup> Sunarru Samsi Hariadi, hal. 194.

<sup>19</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 99.

<sup>20</sup> John Field, *Modal Sosial*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana Offset, 2010), hal. 86.



yang positif. Kepercayaan yang sudah dibangun, akan membentuk jaringan sosial, seperti hal sama yang dilakukan kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo. Di mana kerjasama dilakukan karena sudah ada kepercayaan di antar kedua pihak, sehingga ada semangat untuk kerjasama. Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu model pendampingan di dalam proses pembentukan kelompok tani dan pemasaran hasil produksi pertanian.

Dampak jaringan sebagai bagian dari modal sosial, dalam kajian ini, adalah pendampingan pengelolaan dan pemasaran hasil produksi. Ada banyak jaringan untuk melakukan kerjasama dengan kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo; pemerintahan Kabupaten Sleman sebagai pendampingan utama yang memberikan program mengenai kelompok ternak tani; *Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP)* sebagai institusi melakukan pendampingan secara intens mengenai pertanian. Bahkan mahasiswa dari STPP diwajibkan melakukan *Praktek Pekerja Lapangan (PPL)* di kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo. Sementara itu, jaringan pemasaran kelompok tani tidak stagnan, karena sebelumnya dari pemerintahan sudah melakukan memasarkan kepada pasar-pasar terdekat, hingga saat ini masih melakukan pemasaran rutin, yaitu “Pasar Tani” setiap Jum’at pagi di lapangan Pemda Sleman.

## Penutup

Peneliti menarik kesimpulan bahwa, pemerintah sudah berupaya melakukan pemberdayaan kepada kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo. Proses pemberdayaan ini melalui kebijakan yang bersifat *top down*—berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Pemerintah. Asumsi kebijakan yang bersifat *top down* tidak selamanya menuai hasil buruk, hal ini dibuktikan pemerintah dengan mengembangkan sumber daya alam dan masyarakat—melalui kelompok tani—untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Sikap positif pun diambil oleh kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo, guna mengembangkan sumber daya alam yang ada disekitar. Perlahan dari hasil kelompok tani memberikan dampak yang baik bagi para petani sehingga kesejahteraan

lambat laun meningkat.

Sementara pemberdayaan berbasis kemitraan yang sudah berjalan, hasilnya dapat dilihat ketika penjualan hasil panen, di mana pemerintah memberikan wadah untuk menjual hasil produksi pertanian yang ada. Hal ini merupakan bukti konkret terjalinnya hubungan yang baik antara kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo dengan pemerintah Kabupaten Sleman. Lantas, modal utama keberhasilan kemitraan ini adalah diterapkannya pola relasi dan membangun jaringan berbasis modal sosial di tengah kehidupan petani.

## Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- BPS. (2013). "Hasil Sensus Pertanian". <http://rri.co.id/index.php/berita/80482/BPS-Umumkan-Hasil-Sensus-Pertanian-2013>, diakses 25/02/2014.
- Colleman, J. (2010). *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Jakarta: Nusa Media.
- Djunaidi, G. M., & Almanshur, F. (2012). *Metodologi Penelitianm Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Field, J. (2010). *Modal Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana Offset.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samsi, H. S. (2011). *Dinamika Kelompok: Teori dan Aplikasi Keberhasilan Kelompok Tani sebagai Unit Belajar, Kerjasama, Produksi, dan Bisnis*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Suharman, W. (1990). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Suharto, E. (2011). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sukiman. (2006). "Pemberdayaan Kelompok Tani Ngudi Makmur oleh LSM Yayasan Pengembangan Ekonomi Rakyat Indonesia (LSM YAPERINDO) di Desa Jangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo", (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. <http://digilib.uin-suka.ac.id/15640/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.